

**PENUGASAN STUDI KASUS DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN
BERPIKIR KRITIS PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS DI PEMBELAJARAN
AGENDA KEDUDUKAN DAN PERAN PNS DALAM NKRI**

Wulandari Indri Hapsari¹, Arif Rahmat Kurnia²

^{1,2}Balai Pelatihan Kesehatan Semarang

¹wulaningbawono@gmail.com; ²arifrahmatk@gmail.com

Diterima: Desember 2021; Disetujui: Maret 2022

Abstract. *The purpose of this study was to examine the participants' critical thinking skills and the causal factors. This research was a mixed-methods explanatory sequential design using primary and secondary data. Primary data was taken using questionnaires, followed by the Focus Group Discussion (FGD) method to informants who were included in the side deviant cases and in-depth interviews with tutors of the Positions and Roles of Civil Servants in The Republic of Indonesia agenda. The secondary data collected were the characteristics and learning outcomes of participants. The results showed that of the 40 informants, the majority (82.5%) who had attended the Positions and Roles of Civil Servants in The Republic of Indonesia agenda at Bapelkes Semarang were still not in the category of critical thinking. Specific factors that caused this failure were misconceptions, misunderstanding roles, positions, rules, and concepts, and ineffective time management, while general factors that influence this were the lack of critical thinking skills and discussions, misunderstanding critical thinking, physical and psychological resilience, and family conditions that did not support the learning process. Researchers suggest internal and external improvements to improve learning so that the achievement of the critical thinking skills of the trainees becomes optimized.*

Keyword: *basic training for civil servants, causative factors, critical thinking analysis.*

Abstraksi. *Tujuan penelitian adalah menelaah kemampuan berpikir kritis peserta dan faktor penyebabnya. Penelitian ini adalah penelitian mixed method dengan explanatory sequential design memakai data primer dan data sekunder. Data primer kuantitatif diambil dengan kuesioner, yang kemudian dilanjutkan dengan kualitatif memakai metode Focus Group Discussion (FGD) kepada informan yang termasuk dalam deviant case sampling dan wawancara mendalam terhadap tutor agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI. Data sekunder yang dikumpulkan adalah karakteristik dan data hasil belajar peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 40 informan, mayoritas (82,5%) yang telah mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI di Bapelkes Semarang masih belum masuk kategori berpikir kritis. Faktor spesifik yang menyebabkan tidak tercapainya setiap indikator berpikir kritis adalah miskonsepsi, belum memahami dan memetakan aturan maupun konsep, manajemen waktu yang tidak efektif, belum memahami peran dan posisi, sedangkan faktor umum yang mempengaruhi hal tersebut adalah tidak munculnya kemampuan berpikir kritis antara lain kurangnya ruang diskusi, belum memahami makna berpikir kritis, ketahanan fisik dan psikologis, dan kondisi keluarga yang kurang mendukung proses pembelajaran. Peneliti menyarankan perbaikan internal dan eksternal guna memperbaiki pembelajaran sehingga pencapaian kemampuan berpikir kritis peserta latih menjadi lebih optimal.*

Kata kunci: *analisis berpikir kritis, faktor penyebab, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil.*

PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpikir kritis dalam menjalankan fungsinya, akan mampu meningkatkan kualitas praktik penyelenggaraan pemerintahan. PNS yang memiliki kemampuan berpikir kritis akan memaknai ide-ide lama dengan kritis dan mewujudkan rancangan hal baru dengan kreatif dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi di instansi kerjanya karena berkarakter adaptif, inovatif, solutif, dapat menerima perbedaan dan mau bekerja sama dengan yang lainnya (Özdemir, 2020)

Kemampuan berpikir kritis merupakan seni dalam proses berpikir untuk menganalisis dan mengevaluasi kondisi yang ada dengan tujuan memperbaiki. PNS yang memiliki kemampuan berpikir kritis pasti peka, terbuka, dan berkomitmen menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja bersama-sama (Paul & Elder, 2019).

Robert Ennis dalam Klein (2016) mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses berpikir yang berdasar dan menghasilkan suatu keputusan yang harus dilakukan. Lebih lanjut, terdapat lima indikator dalam proses berpikir kritis antara lain: 1) memberikan penjelasan sederhana; 2) membangun keterampilan dasar; 3) menyimpulkan; 4) memberikan penjelasan lebih lanjut; dan 5) strategi dan taktik. PNS yang mampu berpikir kritis memiliki kepekaan dan kemampuan menilai situasi dan kondisi di lingkungannya secara obyektif berdasarkan sumber yang dipercaya atau diyakini, sehingga dapat menyusun strategi yang tepat untuk perbaikan (Elder & Paul, 2020).

Pemerintah melalui Lembaga Administrasi Negara berwenang mengatur penyelenggaraan Pelatihan Dasar bagi Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 94/K.1/PDP.07/2021 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil menetapkan bahwa kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktik penyelenggaraan pemerintahan dari seorang CPNS ditumbuhkan melalui pembelajaran Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI dalam Pelatihan Dasar CPNS.

Tujuan pembelajaran dapat dicapai melalui strategi pembelajaran yang tepat (Fory, Naway, & Pd, 2016). Strategi pembelajaran yang tepat adalah strategi pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran (Lidia Susanti, 2020). Kemampuan berpikir kritis dapat dimunculkan melalui strategi pembelajaran dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kemampuan berpikir kritis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran antara lain: 1) faktor yang berhubungan dengan pendidik; 2) faktor yang terkait dengan yang dididik; 3) perangkat pembelajaran dan teknologi pembelajaran, 4) desain dan implementasi intervensi pembelajaran; 5) pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan melalui intervensi; 6) serta metodologi pembelajaran (Terblanche & de Clercq, 2020). Faktor-faktor tersebut dapat dijadikan dasar dalam menentukan metode pembelajaran yang merupakan komponen dalam strategi pembelajaran. (Afandi, Chamalah, & Wardani, 2013).

Salah satu metode pembelajaran yang terbukti dapat mendorong kemampuan berpikir kritis adalah studi kasus (Anggraeni, 2012). Studi kasus akan menjembatani antara teori dan situasi

kehidupan nyata (Cakmak & Akgün, 2017), sehingga mendorong keaktifan peserta untuk mencari informasi bersama rekan dalam upaya menghadapi permasalahan yang ada di dunia nyata (Akins et al., 2019). Studi kasus juga terbukti dapat merubah emosi dan sikap pembelajar dalam menghadapi permasalahan (Heiney et al., 2019)

Penelitian lain tidak menyepakati bahwa studi kasus dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis (Nuryanti, Zubaidah, & Diantoro, 2018). Studi kasus yang fokus menyelesaikan masalah terbukti hanya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, bukan kemampuan berpikir kritis (Ulger, 2018).

Studi kasus merupakan metode yang lazim dipilih dalam pembelajaran agenda Peran dan Kedudukan bahkan evaluasi di Pelatihan Dasar CPNS. Studi pendahuluan dilakukan di Bapelkes Semarang yang menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS secara jarak jauh dimana metode pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI dilaksanakan menggunakan studi kasus. Kajian dilakukan melalui telaah dokumen pembelajaran dan wawancara terhadap pengampu agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI menggunakan metode studi kasus akan disampaikan dalam 11 jam pelajaran yang terdiri dari 2 jam pelajaran tatap muka maya (*synchronous*) dan 9 jam pelajaran untuk menyelesaikan penugasan individu dengan pendampingan secara jarak jauh melalui media *whatsapp group* (*asynchronous*).

Pembelajaran tatap maya sebanyak 2 jam pelajaran dibagi dalam 2 sesi yaitu sesi awal selama 1 jam pelajaran untuk pembekalan dan sesi akhir selama 1 jam pelajaran untuk pembahasan hasil penugasan studi kasus. Pembekalan disampaikan oleh pengampu

agenda tentang konsep dan aturan yang ada di dalam agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI dihubungkan dengan konsep agenda lain dari Pelatihan Dasar CPNS. Pembekalan selanjutnya adalah tentang langkah-langkah mengerjakan penugasan studi kasus yaitu: 1) peserta menemukan video/artikel tentang praktik penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah yang dinilai baik dan buruk; 2) peserta menganalisis video/artikel yang telah ditemukan menggunakan format penugasan yang telah disediakan oleh pengampu; 3) peserta membahas bersama tentang hasil analisis serta penjelasan tentang langkah analisis menggunakan format penugasan studi kasus antara lain: 1) mendeskripsikan kasus; 2) menjelaskan fakta dan konsep atau aturan yang mendasari penerapan pelayanan publik terbaik dan buruk; 3) menetapkan kegiatan sebagai upaya mempertahankan pelayanan publik yang terbaik dan memperbaiki pelayanan publik yang buruk.

Jika mencermati langkah-langkah analisis yang ditetapkan dalam format penugasan studi kasus, maka dapat disimpulkan bahwa konsep analisis yang dipergunakan telah sesuai dengan konsep model pembelajaran studi kasus. Studi kasus memungkinkan peserta didik untuk mau menerima dan menyelesaikan permasalahan menggunakan pengetahuan dan keterampilannya (Cakmak & Akgün, 2017)

Peserta dalam mengerjakan penugasan studi kasus dapat menyampaikan pertanyaan tentang hal-hal yang belum dipahami dalam mengerjakan dan menyelesaikan penugasan serta mekanisme pengumpulan penugasan kepada pengampu melalui *whatsapp group*. Interaksi antara pengampu dan peserta tetap terjadi selama pembelajaran secara *asynchronous*.

Pembelajaran agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI menggunakan studi kasus diakhiri dengan pembahasan hasil penugasan di sesi akhir selama 1 jam pelajaran. Pembahasan dilakukan menggunakan teknik *brainstorming*. Pengampu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta untuk menyampaikan pendapatnya tentang hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan format penugasan studi kasus.

Beberapa penelitian menunjukkan perbedaan tentang metode pembelajaran studi kasus dapat atau tidak dapat memunculkan kemampuan berpikir kritis. Sedangkan di sisi lain, studi kasus lazim dipergunakan dalam Pelatihan Dasar CPNS dalam rangka memunculkan kemampuan berpikir kritis para CPNS melalui pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah studi kasus yang dipergunakan dalam pembelajaran Agenda Kedudukan dan Peran PNS di Pelatihan Dasar CPNS dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dari para CPNS.

Hasil penelitian dapat memberikan gambaran tentang bagaimana studi kasus dapat atau tidak dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis para CPNS dan faktor apa saja yang mempengaruhi pembelajaran dapat berjalan efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar perbaikan mutu pembelajaran selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian *Mixed Method* dengan jenis *explanatory sequential design*. Deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang dilanjutkan dengan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran dan

mengeksplorasi fenomena yang muncul dalam Pelatihan Dasar CPNS. Penelitian fenomenologi bermanfaat untuk menggambarkan fenomena yang menjadi pengalaman manusia yang memberikan makna (Rorong, 2020). Fenomena merupakan hasil penugasan studi kasus di pembelajaran Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI.

Metode sampling yang digunakan adalah *total sampling* dengan memakai 40 informan yang berasal dari peserta pelatihan dasar CPNS angkatan 13 Golongan III di Bapelkes Semarang yang diselenggarakan tanggal 26 Juli sampai dengan 9 November 2021. Informan kunci pada penelitian ini adalah 3 orang widyaiswara yang merupakan tutor dari materi Agenda Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. *Total sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi sebagai sampel. Metode ini lazim digunakan apabila jumlah populasi di bawah 100 orang (Sugiyono, 2014).

Data sekunder yang dikumpulkan berupa data peserta pelatihan dasar yang meliputi jenis kelamin, usia, golongan dan pangkat, profesi, latar belakang pendidikan, profesi, dan pengumpulan data hasil belajar peserta. Data sekunder tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu data kepesertaan yang ada di panitia penyelenggara dan *Learning Management System* Lembaga Administrasi Negara (Kolabjar ASN Pintar). Data primer diambil oleh peneliti dengan metode Diskusi Kelompok Terarah/ *Focus Group Discussion (FGD)* kepada informan yang termasuk dalam *deviant case sampling* dan wawancara mendalam terhadap tutor agenda 3. Hasil FGD dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) (Purnama, 2015). Analisis data kualitatif dilakukan secara bertahap dengan metode Analisis Data Interaktif

Miles & Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Anggito & Setiawan, 2018). Sedangkan data kuantitatif diolah dengan statistika deskriptif.

Peneliti melakukan telaah terhadap kekritisan peserta latsar dengan menggunakan indikator berpikir kritis yang telah dimodifikasi. Peneliti melakukan analisis terhadap jawaban peserta menggunakan 5 indikator, yaitu memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lebih lanjut, dan strategi dan taktik. Informan dikatakan kritis bila memenuhi 5 indikator tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dimulai dengan menganalisis data primer yang dilakukan pada 40 orang peserta Latsar CPNS angkatan 13 Golongan III Bapelkes Semarang. Adapun

karakteristik informan adalah sebagian besar perempuan (85%) yang mayoritas menduduki jabatan sebagai Penata Muda atau golongan IIIa (90%) dengan rata-rata usia informan adalah 28,2 tahun. Latar belakang pendidikan informan sebagian besar adalah kependidikan (72,5%) dengan profesi sebagai guru dengan rata-rata lama pengalaman bekerja di lingkungan Pemerintahan adalah 39,52 bulan.

Penelitian selanjutnya adalah menelaah kekritisan peserta latsar setelah mendapatkan materi Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI. Informan dikatakan kritis apabila memenuhi kelima indikator, yang terdiri dari memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lebih lanjut, dan strategi dan taktik. Apabila terdapat satu atau lebih indikator yang tidak terpenuhi, maka informan masuk dalam kategori tidak kritis.

Tabel 1. Hasil Penilaian Kemampuan Berpikir Kritis

Kategori	Laki-Laki	Perempuan	Persentase
Berpikir Kritis	0	7	17,5%
Tidak Berpikir Kritis	6	27	82,5%
Total	6	34	100%

Sumber: Data Peneliti, 2021

Hasil telaah berpikir kritis pada tabel 1 menunjukkan bahwa dari 40 informan, hanya sebanyak 7 informan yang berhasil memenuhi 5 indikator berpikir kritis, dan semuanya adalah perempuan. Hal ini sesuai dengan penelitian lain yang menjelaskan bahwa perempuan lebih memiliki kemampuan verbal, kaya ekspresi, dan banyak memiliki kosakata dibandingkan laki-laki (Budi, 2017). Namun masih perlu penelitian lebih lanjut tentang perempuan yang lebih mampu berpikir kritis dibanding

laki-laki mengingat karakteristik informan di penelitian ini sebagian besar adalah perempuan.

Lebih lanjut, hasil telaah juga menunjukkan hanya 17,5% peserta yang memenuhi kriteria berpikir kritis. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, mengingat ada 82,5% informan yang tidak berpikir kritis. Sebanyak 82,5% peserta peserta yang tidak mencapai tujuan pembelajaran adalah jumlah yang besar, sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran agenda kedudukan dan

peran PNS dalam NKRI menggunakan metode studi kasus tidak efektif untuk memunculkan kemampuan berpikir kritis para CPNS. Sehingga perlu upaya untuk mengembangkan metode atau strategi

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar para CPNS (Fakhrurrazi, 2018).

Telaah lebih dalam dilakukan untuk mengetahui pencapaian setiap indikator berpikir kritis dari informan seperti terlihat dalam tabel 2.

Table 2. Pencapaian Indikator Berpikir Kritis

Indikator		Jumlah	Persentase
Indikator 1	Memberikan penjelasan sederhana	25	62,5%
Indikator 2	Membangun keterampilan dasar	38	95%
Indikator 3	Menyimpulkan	26	65%
Indikator 4	Memberikan penjelasan lebih lanjut	16	40%
Indikator 5	Strategi dan taktik	15	37,5%

Sumber: Data Peneliti, 2021

Pada tabel 2 terlihat bahwa tidak ada indikator yang dicapai oleh 100% informan. Pencapaian tertinggi adalah indikator 2 oleh 95% informan dan terendah adalah indikator 5 oleh 37% informan. Penemuan ini memberi makna bahwa pembekalan dan format penugasan studi kasus yang telah diberikan oleh pengampu belum cukup membuat peserta mampu mencapai setiap indikator berpikir kritis sehingga peneliti perlu menggali faktor-faktor penyebabnya.

Indikator 2 merupakan indikator yang paling banyak dicapai oleh informan, yaitu 95%. Membangun keterampilan dasar adalah tentang menyebutkan dan atau menggunakan konsep atau aturan di agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI dalam menganalisis. Penelitian menemukan bahwa penyebab pencapaian tinggi dari indikator ini adalah adanya pembekalan yang diberikan oleh pengampu di sesi awal tatap muka.

Faktor lain yang menyebabkan indikator ini masih belum mencapai 100% adalah

peserta belum memetakan isi aturan maupun konsep agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI. Walaupun aturan dan konsep telah disampaikan dalam pembekalan, namun perlu tindak lanjut dari peserta untuk melakukan pemetaan dari setiap aturan dan konsep sehingga dicapai pemahaman yang lebih dan kongkrit dari aturan dan konsep itu. Pemetaan aturan dan konsep yang jelas akan mempermudah proses refleksi dari aturan atau konsep sebagai dasar melakukan analisis suatu situasi atau kondisi (Gasong, 2018).

Indikator 5 merupakan indikator dengan jumlah pencapaian paling sedikit, yaitu hanya sebanyak 37,5%. Strategi dan taktik adalah tentang menetapkan cara dan kegiatan untuk solusi dari permasalahan yang ada. Artinya, peserta belum cukup mampu menetapkan cara dan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tempat kerja.

Beberapa hal yang dapat memunculkan kemampuan berstrategi antara lain: 1)

Pengenalan akan tugas dan lingkungan di mana dia bekerja (Reid O'Connor & Norton, 2020); 2) disposisi yang jelas dari peserta terhadap permasalahan (Reid O'Connor & Norton, 2020); dan 3) pemahaman yang utuh tentang aturan atau konsep yang dihubungkan dengan teknis permasalahan (Morrison-Love, 2021). Temuan ini memberikan makna bahwa CPNS yang telah memiliki pengalaman kerja di lingkungan Pemerintahan yang cukup lama yaitu rata-rata 39,52 bulan atau sekitar 3 tahun ternyata belum cukup mengenal tugas dan lingkungan kerjanya, belum ada kejelasan atau belum memahami disposisi yang ditetapkan, dan belum memahami secara utuh tentang aturan dan konsep dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Walaupun penelitian ini hanya dibatasi satu angkatan Pelatihan Dasar CPNS dengan 40 peserta yang cukup homogen, namun temuan ini seyogyanya dapat mendorong untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang komitmen CPNS dalam mengenal dan melaksanakan kedudukan, peran, dan fungsi sesuai aturan dan konsep yang ditetapkan.

Indikator 1 tentang kemampuan memberikan penjelasan sederhana ditunjukkan dengan adanya deskripsi kesesuaian dan ketidaksesuaian antara fakta dengan konsep atau aturan di agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI. Hasil penelitian secara deskriptif menunjukkan bahwa tidak tercapainya indikator ini disebabkan karena munculnya miskonsepsi pada peserta. Hal ini senada dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa rendahnya keterampilan berpikir kritis dikarenakan adanya miskonsepsi (Rosdiana, Sutopo, & Kusairi, 2019).

Miskonsepsi terjadi karena cara pandang yang didasarkan pada asumsi yang menimbulkan pemikiran asosiatif dan

humanistik. Selain itu miskonsepsi juga terjadi karena analisis yang dilakukan tidak berdasar pada fakta dan data namun berdasar pada perasaan atau intuisi. (Mukhlisa, 2021).

Ketidakmampuan memberikan penjelasan sederhana juga disebabkan oleh kurangnya sikap luhur atau lesu ketika menghadapi tantangan pembelajaran atau penugasan yang berat seperti banyaknya materi yang dipelajari dalam waktu tertentu. Sikap seperti ini menjadi salah satu penyebab kegagalan belajar (Misdar, 2018)

Indikator 3 tentang kemampuan menyimpulkan ditunjukkan dengan simpulan yang ditetapkan berdasarkan belakang fakta dan konsep agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI. Penyebab indikator ini tidak tercapai adalah ketidakefektifan peserta dalam melakukan manajemen waktu. Hal ini selaras dengan penelitian yang menyatakan bahwa hasil belajar tidak akan tercapai jika manajemen waktu tidak dilakukan dengan optimal (Minarto, 2018).

Alokasi waktu untuk mengerjakan studi kasus selama 9 jam pelajaran dinilai tidak cukup untuk peserta menetapkan simpulan berdasarkan fakta dan konsep. Simpulan secara langsung ditetapkan dari hasil miskonsepsi yang telah terjadi di awal analisis.

Manajemen waktu yang tidak optimal disebabkan peserta belum dibebastugaskan oleh instansi. Selain mengikuti Pelatihan Dasar CPNS, peserta masih menerima tugas tambahan dari Pimpinan Instansi dengan tenggat waktu tertentu untuk penyelesaian tugas. Tuntutan pekerjaan seperti ini berdampak peserta tidak fokus belajar (Abbas & Yusuf Hidayat, 2018).

Indikator 4 tentang kemampuan membuat penjelasan lebih lanjut ditunjukkan dengan adanya penjelasan lebih lanjut dari apa yang telah disimpulkan sebagai dasar dari

menetapkan strategi perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak tercapainya indikator ini disebabkan belum adanya pemahaman tentang peran ASN sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawas seyogyanya memiliki kepekaan terhadap setiap permasalahan dan memiliki komitmen untuk menyelesaikannya. Pemahaman yang cukup tentang konsep dari suatu peran akan mempengaruhi sikap seseorang untuk mau melakukan apa yang menjadi kewajibannya (Alwafi Ridho Subarkah, 2018).

Hasil penelitian juga menunjukkan beberapa penyebab belum tercapainya indikator berpikir kritis yang ditemukan di setiap indikator yang dalam penelitian ini disebut sebagai penyebab umum. Beberapa penyebab umum yang ditemukan antara lain: 1) kurangnya ruang diskusi; 2) belum memahami makna berpikir kritis; 3) ketahanan fisik dan psikologis; dan 4) kondisi keluarga yang kurang mendukung pembelajaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan diskusi kasus yang berdiri sendiri tidak cukup untuk memunculkan kemampuan berpikir kritis. Perlu didukung adanya ruang-ruang diskusi yang cukup untuk melakukan *brain storming*, penyajian hasil diskusi, dan pembahasan bersama untuk memastikan pola pikir telah sesuai aturan atau konsep yang ditetapkan. Pernyataan di atas selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Berjamai & Davidi, (2020) bahwa kurangnya pengampu memberikan ruang untuk membahas suatu kasus bersama peserta, menyebabkan peserta kurang bereksplorasi dan menghambat kemampuan berpikir kritis.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yuyu Yuningsih & Putri Wulandari Atur Rejeki (2021) juga menunjukkan bahwa Pelatihan

Dasar CPNS secara daring yang memiliki alokasi waktu tatap muka tidak sebanyak klasikal memberikan hasil belajar yang signifikan berbeda dengan klasikal. Perbedaan ini disebabkan oleh kurangnya interaksi antara pengajar dan peserta serta kohesifitas peserta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta mengetahui jika berpikir kritis dibutuhkan dalam bekerja, namun belum ada pemahaman yang benar tentang definisi berpikir kritis, *best practice*, *bad practice*, dan dasar mengapa berpikir kritis diperlukan dalam bekerja sebagai seorang pelayan publik. Peserta memahami berpikir kritis hanyalah tentang kepekaan dan kekritisannya menilai suatu kondisi penyelenggaraan pelayanan publik. Peserta belum memahami tentang perlunya berperan memberikan solusi atau melakukan inovasi untuk perbaikan mutu penyelenggaraan pelayanan publik. Redhana, (2019) menyatakan bahwa berpikir kritis tidak hanya soal melakukan kritik tetapi juga bagaimana menghasilkan solusi dan inovasi yang tepat untuk permasalahan pada pelayanan publik. (Latifah & Afriansyah, 2021) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa ketidapahaman peserta tentang makna atau maksud serta tujuan akhir mengerjakan penugasan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peserta tidak mampu menetapkan solusi pemecahan masalah. Temuan ini semakin menguatkan hasil penelitian tentang rendahnya pencapaian indikator 5 oleh informan.

Tugas mandiri di setiap agenda baik agenda Sikap Perilaku Bela Negara dan Nilai-nilai Dasar PNS dinilai cukup banyak oleh peserta dan membutuhkan waktu penyelesaian tugas lebih dari waktu pembelajaran yang ditetapkan. Sehingga ketika memasuki agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI peserta sudah

merasa lelah sehingga berdampak peserta kurang fokus dalam pembelajaran. Selain itu, adanya karakteristik psikologis peserta yang mudah panik dan buru-buru ingin cepat selesai sehingga dalam mengerjakan tugas menjadi tidak cermat. Kondisi ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafi'i, Marfiyanto, & Rodiyah, (2018) bahwa kondisi ketahanan fisik dan psikologis berpengaruh terhadap hasil belajar.

Pembelajaran secara daring seyogyanya memiliki potensi besar untuk pembelajaran lebih efektif dan efisien karena fleksibel dapat dilakukan di manapun dan kapanpun (Setiawati, 2021). Kenyataannya, pembelajaran daring yang memungkinkan peserta belajar dari rumah menjadi tidak fokus mengikuti pembelajaran karena kondisi anak yang memerlukan kehadiran orang tua. Artinya terjadi ketidaksiapan peserta dalam mengkondisikan keluarga yang dapat mempengaruhi hasil belajar (Syafi'i et al., 2018).

Pengembangan strategi pembelajaran perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kemampuan berpikir kritis peserta didasarkan pada analisis penyebab khusus tidak tercapainya setiap indikator dan penyebab umum, antara lain: 1) membangun kesiapan belajar; 2) strategi pembelajaran kognitif; 3) penggunaan lembar kerja inkuiri terbimbing; 4) menambah ruang diskusi; 5) menetapkan sistem penilaian yang tepat; dan 6) meningkatkan dukungan instansi asal peserta.

Kesiapan belajar akan meningkatkan motivasi belajar sehingga berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajar (Kim, Park, & Kang, 2019). Tanpa membangun kesiapan belajar dari peserta, maka seluruh proses pembelajaran menjadi kurang bermakna. Oleh karena itu, membangun kesiapan belajar sebelum pembelajaran dimulai

menjadi tugas penting bagi tutor atau pengampu pembelajaran. Kesiapan belajar mencakup kondisi fisik, psikis, dan emosional peserta yang siap melakukan pembelajaran (Dangol & Shrestha, 2019)

Kesiapan belajar didefinisikan sebagai kemampuan pembelajar yang secara mandiri beradaptasi terhadap lingkungan belajar yang baru dan menggunakan teknologi baru. Kesiapan belajar sangat dipengaruhi oleh adanya komitmen dan minat belajar yang tinggi (Gay, 2018).

Tutor atau pengampu membangun kesiapan belajar melalui kegiatan yang dapat mengarahkan peserta untuk mau berkomitmen belajar dan menumbuhkan minat peserta terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan, sehingga peserta secara mandiri akan sadar untuk menyiapkan fisik, psikis, dan emosionalnya selama mengikuti pembelajaran.

Strategi pembelajaran kognitif diperlukan untuk meminimalisir terjadinya miskonsepsi (Adi & firdaviani, 2019) yang dapat dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian. Peserta diberikan tugas untuk memetakan dan menghubungkan regulasi dan konsep-konsep agenda 3 yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta sehingga belajar menjadi lebih sistematis dan mudah (Widyantari, Suardana, & Devi, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Nisa, Koestiari, Habibulloh, & Jatmiko, (2018) menunjukkan bahwa, pembelajaran menggunakan lembar kerja inkuiri terbimbing terbukti efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Inkuiri merupakan model pembelajaran konstruktivisme dimana peserta diarahkan mandiri dan aktif membangun pengetahuannya, dan mengembangkan

untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian tentang kelayakan lembar kerja inkuiri terbimbing dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis juga ditunjukkan oleh Apriyana, Herlina, & Abdurrahman, (2019). Poin yang harus ada di dalam lembar kerja ada 2 yaitu konsep-konsep yang dipergunakan dalam penugasan dan prosedur dalam mengerjakan penugasan serta definisi operasional dari setiap langkah-langkahnya (Firdaus & Wilujeng, 2018) agar peserta memahami maksud dan tujuan dari penugasan dan memiliki arah yang jelas tentang bagaimana mengerjakan tahap demi tahap penugasan sampai selesai.

Pelatihan dasar CPNS angkatan 13 diselenggarakan dengan metode *blended learning* sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 93/K.1/PDP.07/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Pembelajaran daring di fase *distance learning* dilakukan secara *synchronous* dan *asynchronous*. Ruang diskusi menjadi hal pokok yang dipergunakan dalam pembelajaran *asynchronous*, karena di dalam diskusi terjadi interaksi dan komunikasi secara alami (Bernstein & Isaac, 2018) yang berpotensi meningkatkan pencapaian hasil belajar.

MacKnight dalam Bernstein & Isaac, (2018) menyatakan bahwa poin-poin yang perlu didiskusikan secara *asynchronous* untuk memunculkan kemampuan berpikir kritis adalah tentang memahami dan menghubungkan konsep-konsep, menerapkan konsep, menganalisis penerapan, mensintesis, dan mengevaluasi yang keseluruhannya direfleksikan dan dikomunikasikan. Hasil diskusi tidak cukup jika hanya dikumpulkan. Perlu penilaian dari

tutor atau pengampu tentang apakah proses penalaran dan berpikir kritis peserta telah benar (Al-Husban, 2020).

Penilaian terdiri dari proses penalaran dari mulai mengidentifikasi data dan fakta dengan akurat sampai menetapkan strategi dan solusi serta proses berpikir kritis yang kreatif yang ditunjukkan dengan munculnya persepsi baru, sanggahan-sanggahan, dan pencarian alternatif. Sehingga agar pembelajaran dan hasil belajar optimal, diperlukan tidak hanya keterampilan tingkat tinggi peserta dalam proses memunculkan kemampuan berpikir kritis, namun juga keterampilan tingkat tinggi tutor dalam merumuskan tugas pembelajaran daring dan rubrik penilaian hasil diskusi yang memastikan terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta (Al-Husban, 2020). Kewajiban dan tugas pengajar adalah dari mulai mengidentifikasi karakteristik siswa, memilih materi pelajaran, menentukan informasi sesuai dengan pembelajaran agar bermakna, mempelajari konsep inti, sampai melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa (Baharuddin, 2020).

Dukungan instansi asal peserta agar peserta lebih fokus mengikuti pembelajaran selama latsar dengan tidak memberikan beban pekerjaan di luar konteks latsar akan memberi ruang yang lebih luas bagi peserta untuk mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mirabolghasemi, et al. (2019) bahwa dukungan manajemen merupakan faktor yang signifikan berpengaruh terhadap kesiapan belajar.

SIMPULAN

Berpikir kritis merupakan kemampuan yang esensial dimiliki oleh seorang PNS. Penelitian ini mengungkapkan bahwa mayoritas PNS (82,5%) yang telah

mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Agenda 3 di Bapelkes Semarang masih belum masuk kategori berpikir kritis. Peneliti menemukan ada faktor yang secara spesifik menyebabkan setiap indikator berpikir kritis tidak tercapai yaitu terjadinya miskonsepsi, belum memahami dan memetakan aturan maupun konsep, manajemen waktu yang tidak efektif, belum memahami peran dan posisi. Penelitian ini menemukan empat

faktor yang menjadi penyebab secara umum tidak munculnya kemampuan berpikir kritis antara lain kurangnya ruang diskusi, belum memahami makna berpikir kritis, ketahanan fisik dan psikologis, dan kondisi keluarga yang kurang mendukung proses pembelajaran sehingga ditetapkan strategi untuk pencapaian kemampuan berpikir kritis yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., & Yusuf Hidayat, M. (2018). Faktor-Faktor Kesulitan Belajar Fisika Pada Peserta Didik Kelas Ipa Sekolah Menengah Atas. *JPF (Jurnal Pendidikan Fisika) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 6(1), 45–49. <https://doi.org/10.24252/jpf.v6i1a8>
- Adi, Y. K., & Oktaviani, N. M. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Miskonsepsi Siswa Sd Pada Materi Life Processes and Living Things. *Profesi Pendidikan Dasar*, 1(1), 91–104. <https://doi.org/10.23917/ppd.v1i1.7988>
- Afandi, M., Chamalah, E., & Wardani, O. P. (2013). Model Dan Metode Pembelajaran Di Sekolah. In *Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)* (Vol. 392).
- Akins, J., Lamm, A., Telg, R., Abrams, K., Meyers, C., & Raulerson, B. (2019). Seeking and engaging: Case study integration to enhance critical thinking about agricultural issues. *Journal of Agricultural Education*, 60(3). <https://doi.org/10.5032/jae.2019.03097>
- Al-Husban, N. A. (2020). Critical Thinking Skills in Asynchronous Discussion Forums: A Case Study. *International Journal of Technology in Education*, 3(2), 82. <https://doi.org/10.46328/ijte.v3i2.22>
- Alwafi Ridho Subarkah. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ekobis Dewantara*, 1, 64–70.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari, ed.). Sukabumi: CV Jejak.
- Anggraeni, L. (2012). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Pada Mata Kuliah Hubungan Internasional. *Media Komunikasi FIS*, 11(Education), 1–15.
- Apriyana, N., Herlina, K., & Abdurrahman. (2019). Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Inkuiri Terbimbing Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis. *Jurnal Pendidikan Fisika*, 7(2), 92–96.
- Baharuddin, I. (2020). Pembelajaran Bermakna Berbasis Daring di Tengah Pandemi COVID-19. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 5(2), 79–88.
- Berjamai, S., & Davidi, N. (2020). Kajian Faktor-Faktor Penghambat Keterampilan Pelajaran Bahasa Indonesia. *Literasi Pendidikan Dasar*, 1(1).
- Bernstein, A. G., & Isaac, C. (2018). *Critical Thinking Criteria for Evaluating Online*

Discussion The Importance of Critical Thinking within Online Discussion The Importance of Online Discussion for Critical Thinking Evaluative Criteria of Rubrics as Prompts for Meaningful Discussion Rubrics . 12(2), 1–8.

- Budi, C. (2017). Analisis Ketrampilan Berfikir Kritis Dalam Memecahkan Masalah Ditinjau Perbedaan Gender. *Aksioma*, 8(1), 52.
- Cakmak, Z., & Akgün, I. H. (2017). A Theoretical Perspective on the Case Study Method. *Journal of Education and Learning*, 7(1), 96. <https://doi.org/10.5539/jel.v7n1p96>
- Dangol, R., & Shrestha, M. (2019). Learning Readiness and Educational Achievement among School Students. *The International Journal of Indian Psychology*, 7(2), 468. <https://doi.org/10.25215/0702.056>
- Elder, L., & Paul, R. (2020). *Critical thinking: Tools for taking charge of your learning and your life*. Foundation for Critical Thinking.
- Fakhrurrazi, O. : (2018). HAKIKAT PEMBELAJARAN YANG EFEKTIF. In *Jurnal At-Tafkir*.
- Firdaus, M., & Wilujeng, I. (2018). Pengembangan LKPD inkuiri terbimbing untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik. *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA*, 4(1), 26–40. <https://doi.org/10.21831/jipi.v4i1.5574>
- Fory, H., Naway, A., & Pd, M. (2016). *STRATEGI PENGELOLAAN PEMBELAJARAN*.
- Gasong, D. (2018). *Belajar dan pembelajaran*. Deepublish.
- Gay, G. H. E. (2018). Fixing the ‘ready’ in e-learning readiness. *Trends in E-Learning*, 65–83.
- Heiney, S., Polyakova, V., & DeGregory, C. (2019). *Using a continuing Multimedia Case Study to Develop Critical Thinking and Empathy*.
- Kim, E.-J., Park, S., & Kang, H.-S. (Theresa). (2019). Support, training readiness and learning motivation in determining intention to transfer. *European Journal of Training and Development*, 43(3/4), 306–321. <https://doi.org/10.1108/EJTD-08-2018-0075>
- Klein, E. (2016). Developing Minds. In *Developing Minds*. <https://doi.org/10.4324/9781315623511>
- Latifah, T., & Afriansyah, E. A. (2021). Kesulitan dalam kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi statistika. *Journal of Authentic Research on Mathematics Education (JARME)*, 3(2), 134–150.
- Lidia Susanti, S. P. (2020). *Strategi pembelajaran berbasis motivasi*. Elex Media Komputindo.
- Minarto, W. Y. (2018). Hubungan Kesiapan Belajar, Manajemen Waktu, Kecemasan Dalam Mengerjakan Tes, Dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Teknik Listrik Dasar Otomotif Siswa Smk. *Teknologi Dan Kejuruan: Jurnal Teknologi, Kejuruan, Dan Pengajarannya*, 41(1), 37–44. <https://doi.org/10.17977/um031v4i12018p037>
- Mirabolghasemi, M., Choshaly, S. H., & Iahad, N. A. (2019). Using the HOT-fit model to predict the determinants of E-learning readiness in higher education: a developing Country’s perspective. *Education and Information Technologies*, 24(6), 3555–3576. <https://doi.org/10.1007/s10639-019-09945-9>

- Misdar, M. (2018). Mengkritisi Faktor-Faktor Kegagalan Akademik Siswa Dalam Belajar. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 205–224. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i2.2465>
- Morrison-Love, D. (2021). Technological problem solving: an investigation of differences associated with levels of task success. *International Journal of Technology and Design Education*. <https://doi.org/10.1007/s10798-021-09675-5>
- Mukhlisa, N. (2021). Miskonsepsi Pada Peserta Didik. *SPEED Journal : Journal of Special Education*, 4(2), 66–76. <https://doi.org/10.31537/speed.v4i2.403>
- Nisa, E. K., Koestiari, T., Habibulloh, M., & Jatmiko, B. (2018). Effectiveness of guided inquiry learning model to improve students' critical thinking skills at senior high school. *Journal of Physics: Conference Series*, 997(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/997/1/012049>
- Nuryanti, L., Zubaidah, S., & Diantoro, M. (2018). *Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP*. Retrieved from <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/>
- Özdemir, İ. (2020). CRITICAL THINKING AND INNOVATION: AN ISLAMIC PERSPECTIVE. *Journal of Technology and Operations Management*, 15(Number 2), 33–41. <https://doi.org/10.32890/jtom2020.15.2.4>
- Paul, R., & Elder, L. (2019). *The miniature guide to critical thinking concepts and tools*. Rowman & Littlefield.
- Purnama, S. G. (2015). *Panduan Focus Group Discussion (FGD) dan Penerapannya*. Bandung: Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana.
- Redhana, I. W. (2019). Mengembangkan Keterampilan Abad Ke-21 Dalam Pembelajaran Kimia. *Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia*, 13(1).
- Reid O'Connor, B., & Norton, S. (2020). Supporting indigenous primary students' success in problem-solving: learning from Newman interviews. *Mathematics Education Research Journal*. <https://doi.org/10.1007/s13394-020-00345-8>
- Rorong, M. J. (2020). *Fenomenologi*. Deepublish.
- Rosdiana, S. R., Sutopo, S., & Kusairi, S. (2019). Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA pada Materi Fluida Statis. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 4(6), 731. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v4i6.12484>
- Setiawati, A. (2021). Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Menggunakan LMS pada Lembaga Diklat Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Bestari*, 2(1), 1–22.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i, A., Marfiyanto, T., & Rodiyah, S. K. (2018). Studi Tentang Prestasi Belajar Siswa Dalam Berbagai Aspek Dan Faktor Yang Mempengaruhi. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 2(2), 115. <https://doi.org/10.32585/jkp.v2i2.114>
- Terblanche, E. A. J., & de Clercq, B. (2020). Factors to consider for effective critical thinking development in auditing students. *South African Journal of Accounting Research*, 34(2), 96–114. <https://doi.org/10.1080/10291954.2019.1669293>
- Ulger, K. (2018). The effect of problem-based learning on the creative thinking and critical thinking disposition of students in visual arts education. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 12(1). <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1649>

- Widyantari, N. K. S., Suardana, I. N., & Devi, N. L. P. L. (2019). Pengaruh Strategi Belajar Kognitif, Metakognitif Dan Sosial Afektif Terhadap Hasil Belajar Ipa. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sains Indonesia (JPPSI)*, 2(2), 151. <https://doi.org/10.23887/jppsi.v2i2.19384>
- Yuningsih, Y., & Rejeki, P. W. A. (2021). Kompetensi Peserta Pelatihan Sebelum dan Saat Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Latsar CPNS. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 1–36. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.56>